

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN
NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI: SEBUAH
TINJAUAN LITERATUR**

(Skripsi)

**Oleh
PADILA
1816041023**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Oleh

Padila

Permasalahan gizi kurang atau *stunting* merupakan salah satu masalah yang akan berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta proses pembangunan suatu negara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *systematis literature review* (SLR) yang terdiri dari empat langkah, yaitu *search, appraisal, synthesis, and analysis* (SALSA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang diambil ialah jenis data sekunder dengan sumber yang bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, seperti *google research, google scholar, dan research gate*. Dalam analisis data, peneliti mengukur pengimplementasian kegiatan dalam kebijakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 dengan menggunakan tiga elemen, yaitu komunikasi, sumber daya, dan perilaku kelompok sasaran.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam 57 artikel jurnal menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, dan perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kegiatan kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi telah dilakukan dengan maksimal. Namun, dibalik itu masih terdapat beberapa artikel jurnal dengan lokasi penelitian yang berbeda menunjukkan masih adanya faktor penghambat dalam pengimplementasiannya sehingga kegiatan-kegiatan dalam kebijakan tersebut diimplementasikan kurang maksimal dan bahkan tidak diimplementasikan.

Kata kunci: Analisis Implementasi, Kebijakan, Perpres Nomor 42 Tahun 2013, Stunting, Tinjauan Pustaka Sistematis

ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL MOVEMENT TO ACCELERATE NUTRITION IMPROVEMENT: A LITERATURE REVIEW

By

Padila

The problem of stunting is one of the problem that will have a negative impact on the social and economic welfare of the community and the development process of a country. This study aims to analyze and find out the implementation of Presidential Regulation Number 42 of 2013 concerning the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement. This thesis analysis was carried out using the systematic literature review (SLR) method which consisted of four steps, namely search, assessment, synthesis, and analysis (SALSA). This study uses a qualitative approach and descriptive analysis. The sources and types of data taken are secondary data types with sources that are bibliographical or derived from various literature, such as Google Research, Google Scholar, and Research Gate. In data analysis, researchers measured the implementation of activities in Presidential Regulation Number 42 of 2013 by using three elements, namely communication, resources, and behavior of the target group.

The research results obtained in 57 journal articles indicate that the communication, resources, and behavior of the target group in the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement policy activities have been carried out optimally. However, behind that there are still several journal articles with different research locations showing that there are still obstacles in implementation so that the activities in the policy are not implemented optimally and are not even implemented.

Key words: Implementation Analysis, Policy, Presidential Regulation Number 42 of 2013, Stunting, Systematic Literature Review

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN
NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI: SEBUAH
TINJAUAN LITERATUR**

**Oleh:
PADILA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Administrasi Negara**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

Nama Mahasiswa : *Padila*
Nomor Pokok Mahasiswa : 1816041023 Program
Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP.,M.AP
NIP.198308152010122002

Nana Mulyana, S.IP.,M.Si
NIP.197106152005011003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meillyana, S.IP.,M.A.
NIP.197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP.,M.AP



Sekretaris

: Nana Mulyana, S.IP.,M.Si



Penguji Bukan Pembimbing

: Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Januari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Padila

NPM 1816041023

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Padila. Dilahirkan di Dusun IV Desa Tebing Abang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada 17 Oktober 1999 yang merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Ilham Surbani dan Ibu Masnia. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, yaitu Almarhum Palah Saudi dan Almarhum Fathul Rozak yang telah meninggal saat penulis belum lahir, dan kakak ketiga bernama Fauzi yang sudah menikah dan mempunyai 2 anak perempuan. Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri 17 Rantau Bayur, selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Rantau Bayur dan Sekolah Menengah

Atas Negeri 2 Plus Banyuasin III. Penulis tercatat sebagai mahasiswi Strata 1 di Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung pada tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis pernah aktif di beberapa organisasi yaitu organisasi jurusan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara), organisasi fakultas kampus Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI), dan organisasi universitas yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (BEM U KBM). Penulis juga telah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu program Universitas Lampung di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, selama 40 hari dan juga telah melaksanakan Program Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung tahun 2021.

Penulis sangat menyukai kegiatan sosial dan kemanusiaan sehingga pada akhir tahun 2020 penulis mulai bergabung dalam Madrasah Relawan Lampung, selain itu penulis ikut dalam *Campaign* Peduli Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Caree Indonesia dan *Campaign Community*. Sebagai bentuk kecintaan terhadap kegiatan kemanusiaan penulis juga mendirikan (*founder*) Rumah Kreativitas Islam (RKI) di Desa Tebing Abang yang merupakan komunitas kecil yang bergerak dibidang pendidikan non formal.

Pada tahun 2019 penulis masuk dalam finalis Duta Mahasiswa GenRe (Generasi Berencana) Universitas Lampung. Penulis juga mendapatkan beberapa penghargaan lainnya, seperti Juara 2 Kategori Bidang Akademik dalam Himagara Awards 2021, Juara 2 Lomba Video Kreatif tingkat Provinsi Lampung dalam LLF 2021, mendapatkan Awards Kategori Honorable Mention di *Indonesian Youth Conference on Violence (IYCV) 2022*, *Awarded Verbal Commendation in International Criminal Police Organization (INTERPOL) Council in Neolaia International Model United Nations* tahun 2021, dan *Delegate of The International Criminal Police Organization (INTERPOL) at Asia Youth International Model United Nations Virtual Conference* tahun 2021.

MOTTO

“Yakinlah pada mimpimu dan percaya pada diri sendiri. Pelajari keterampilan dan taktik orang lain, namun jangan mengubah mimpimu. Jika ada 9 ekor kelinci dan kamu ingin menangkap salah satunya, maka fokuslah pada satu ekor kelinci itu. Ubah taktikmu jika perlu, tapi jangan ubah kelinci yang ingin kamu tangkap”

- Jack Magic -

“Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian dipelupuk matamu”

- Imam Syafi'i -

“There are some values that you should never compromise on to stay true to yourself; You should be brave to stand up for what you truly believe in even if you stand alone”

“Semuanya bukan hanya tentang nilai, keberhasilan dan kesuksesan tapi juga tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

Untuk kakak dan ayuk ipar yang selalu menyemangati untuk terus berusaha sebaik mungkin menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berproses dalam segala hal.

Untuk kedua keponakan ku yang juga menjadi sumber energiku untuk terus belajar dan tumbuh.

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah memberikan ilmu dan menjadi mentor diskusi tugas dan skripsi ini.

Untuk sahabatku tersayang yang menemani dan menyemangati selama pengerjaan skripsi ini.

Teman-teman Administrasi Negara Unila angkatan 2018 yang telah menjadi pewarna kehidupan penulis selama masa perkuliahan terutama menjadi teman diskusi terkhusus bagi rekan-rekan Reguler A.

Terimakasih atas segalanya
Serta untuk Almamaterku tercinta,
Jurusan Administrasi Negara,
Universitas Lampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, setelah melewati berbagai tahap, akhirnya rampung sudah pengerjaan skripsi ini.

Skripsi dengan Judul “Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi: Sebuah Tinjauan Literatur” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekuarangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua Pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dukungan dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada:

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan dan ridho-Nya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhanida, M.Si., Selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku ketua jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing Utama

untuk segala bimbingan, kesabaran, waktu dan tenaga yang telah Ibu curahkan kepada Penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Pak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala bimbingan, kesabaran, waktu dan tenaga yang telah bapak curahkan kepada Penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembahas Skripsi Penulis untuk bimbingan, saran dan kritik yang telah diberikan terhadap skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Administrasi Negara.
9. Kedua orang tua Penulis, Abah Ilham Surbani yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi kepada Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan Almarhumah Ibu Masnia yang selalu mendukung penulis dalam menjalankan segala aktivitas positif dan telah memberikan banyak pelajaran untuk tetap bertumbuh, bertahan dan berproses dalam hidup termasuk proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak saya Fauzi dan ayuk ipar saya Irmawati untuk semangat, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
11. Kedua ponakan ku, Alita dan Miftahul Jannah yang telah menjadi bagian dari sumber energiku untuk terus berproses menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan untuk terus bertumbuh dan menjadi umat Allah yang mengakar kuat.
13. Sahabat-sahabat dari masa SMA yang selalu saling mendukung dan mendengarkan keluh kesah dalam segala hal termasuk penyusunan hasil skripsi.
14. Menteri Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita (PPW) BEM U KBM 2019, mbak Pina Kartika terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu optimis dalam berproses dan meningkatkan kedisiplinan diri untuk mencapai tujuan.
15. Sahabat-sahabat diperkuliahan, terimakasih atas segala canda, tawa, keluh dan

kesah, selama 4 tahun yang penuh suka dan sedikit duka. Tanpa kalian semua, rasanya kehidupan kampus takkan meninggalkan kesan yang sedemikian mendalam.

16. Rekan-rekan organisasi kampus, terimakasih telah bekerjasama dan menjadi bagian tempat ku untuk berdiskusi, belajar, berkembang dan mendapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa.
17. Seluruh teman-teman Strata 1 Administrasi Negara angkatan 2018 tanpa terkecuali, semoga kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai kita semua.
18. Teman-teman Madrasah Relawan Lampung, terimakasih telah berjuang bersama untuk kebaikan sesama dalam hal kemanusiaan dan keagamaan.
19. Saudara-saudara di Dewan Dakwah Lampung, terimakasih selalu memberikan motivasi dan tempat rehat untuk menguatkan iman.
20. Kepada seluruh pihak yang membantu dalam kelancaran dan kesuksesan Skripsi penulis.
21. Terimakasih untuk diri sendiri karena terus berikhtiar dan tetap berusaha menjaga niat. Sebab niat sangat memiliki dampak besar untuk mencapai urusan-urusan dunia dan akhirat.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

Padila

NPM 1816041023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan tentang Kebijakan	9
2.2. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik	11
2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.3. Tinjauan tentang Penanganan Stunting.....	23
2.4. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Pendekatan Penelitian	31
3.3. Fokus Penelitian.....	32
3.4. Sumber dan Jenis Data.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6. Langkah <i>Systematis Literature Review</i>	35
3.6.1. Langkah 1: Pencarian Pustaka (<i>Search</i>)	35
3.6.2. Langkah 2: Seleksi Artikel (<i>Appraisal</i>)	36
3.6.3. Langkah 3: Digitalisasi Artikel (<i>Synthesis</i>)	37
3.6.4. Langkahh 4: Analisa Data (<i>Analysis</i>)	37
3.7. Teknik Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan	41
4.2. Gambaran Umum Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.....	44
4.3. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
4.4. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	48
4.3.1. Hasil Seleksi Artikel.....	49

4.3.2. Hasil Synthesis.....	52
4.5. Analisis Data.....	82
4.5.1. Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.....	82
4.5.2. Faktor Penghambat dalam Pengimplementasian Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran	101
Daftar Pustaka	
Lampiran.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prevalensi <i>Stunting</i> di Indonesia tahun 2019-2021.....	5
Tabel 3.1 Kriteria Inklusi.....	35
Tabel 4.1 Daftar Artikel Jurnal.....	48
Tabel 4.2 Hasil <i>Quality Assesment</i>	50
Tabel 4.3 Hasil <i>Synthesis</i>	53
Tabel 4.4 Hasil Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013.....	72
Tabel 4.5 Hasil Komunikasi Perpres Nomor 42 Tahun 2013.....	74
Tabel 4.6 Hasil Sumber Daya Manusia dalam Impementasi Kebijakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013.....	77
Tabel 4.6 Hasil Sarana dan Prasarana dalam Impementasi Kebijakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013.....	80
Tabel 4.8 Hasil Kelompok Sasaran.....	80

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang dan memiliki keluasan serta jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Dengan keluasan wilayah yang dimiliki, tentunya menarik banyaknya aneka ragam budaya disetiap provinsi ataupun daerah yang ada. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin mengalami peningkatan di Indonesia terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 266.911,9 juta jiwa dan pada tahun 2020 berjumlah 269.603,4 juta jiwa penduduk (Nasrudin, 2020). Selain itu, berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Admindex) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan (Dukcapil, 2021). Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka akan meningkatkan ataupun menimbulkan berbagai permasalahan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas masyarakatnya. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat akan menimbulkan ledakan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum, serta pencapaian kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang tinggi, maka akan memunculkan berbagai permasalahan (Welianto, 2022).

Kesehatan merupakan modal yang paling utama di dalam membangun sumber daya manusia di suatu negara (A. Handayani, 2019). Oleh karena itu, masyarakat akan mampu berkembang dan bertahan serta berpartisipasi untuk negara apabila memiliki kesehatan tubuh yang

maksimal. Dengan demikian, maka kualitas masyarakat atau sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pembangunan suatu negara.

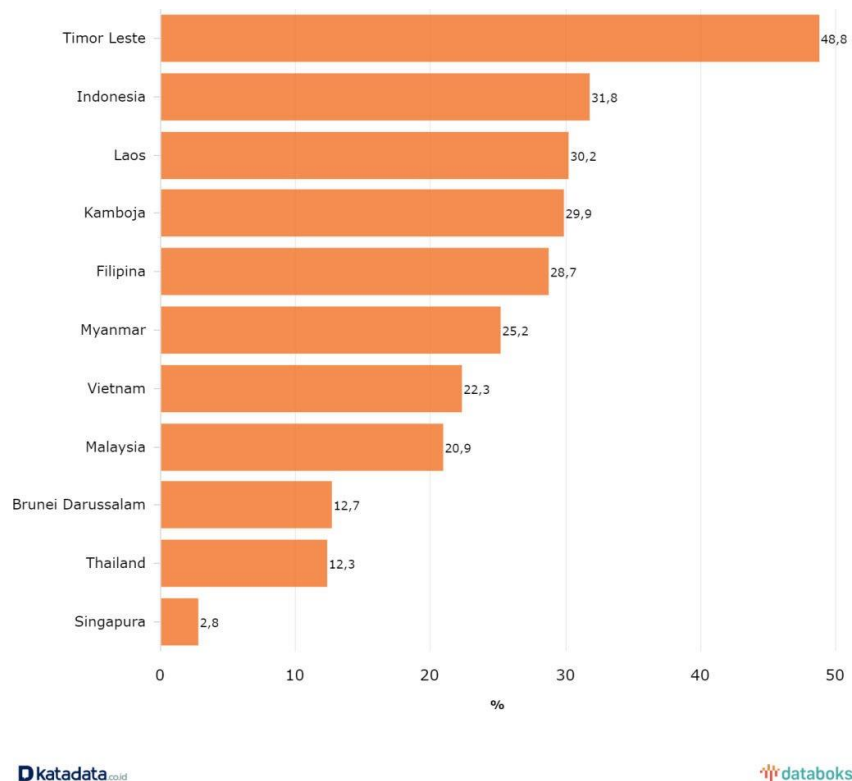
Secara esensial kualitas kesehatan dalam masyarakat ditentukan oleh status gizi. Gizi merupakan zat makanan pokok yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, peranan gizi sangat penting untuk mempertahankan kesehatan seseorang termasuk yang dibutuhkan oleh anak-anak. Maka pemenuhan gizi merupakan suatu hal yang krusial, dikarenakan gizi memiliki peranan dalam perkembangan fisiologis, kemampuan berbahasa, kesadaran sosial dan intelegensi seorang anak (A. Handayani, 2019).

Permasalahan gizi seperti yang dikenal dengan sebutan *stunting* atau gizi kurang merupakan hal yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat di Indonesia. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi (N. K. Handayani, 2017). Menurut *World Health Organization* (WHO), *stunting* adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Apabila seorang anak memiliki tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi median pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO, maka ia dikatakan mengalami *stunting* (Ramadani & Oktavia, 2021). *Stunting* dapat terjadi mulai dari janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kemenkes RI, 2018). *Stunting* yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental (Rahmadhita, 2020).

Masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan yang dimulai sejak dalam kandungan, bayi, anak-anak, dewasa, serta usia lanjut. Periode dua tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis. Hal ini karena pada periode ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.

Gangguan gizi yang terjadi pada periode dua tahun ini bersifat permanen. Selain menyebabkan tinggi badan pendek, gangguan gizi juga bisa menyebabkan obesitas. Seperti yang disebutkan oleh teori *Thrifty Phenotype* (Barker dan Hales) menyatakan bahwa, bayi yang mengalami kekurangan gizi di dalam kandungan dan telah melakukan adaptasi metabolik dan endokrin secara permanen, akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada lingkungan kaya gizi pasca lahir, sehingga menyebabkan obesitas dan mengalami gangguan toleransi terhadap glukosa (Kemenkes RI, 2017). Sebaliknya, risiko obesitas lebih kecil apabila pasca lahir bayi tetap mengonsumsi makanan dalam jumlah yang tidak berlebihan.

Baik atau buruknya gizi pada anak-anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan harapan hidup. Hal itu merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan negara. Oleh karena itu, masalah gizi kurang ini merupakan permasalahan yang sangat serius yang terjadi pada anak Baduta (Bawah Dua Tahun) ataupun anak Balita (Bawah Lima Tahun). Hal tersebut harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah maupun bidang kesehatan dan masyarakat dalam pencegahan terjadinya *stunting*. Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) melaporkan prevalensi anak penderita *stunting* Balita di Asia Tenggara pada tahun 2020 sebagai berikut:



Gambar 1.1

Sumber: (*Asian Development Bank, 2021*)

Pada gambar 1.1 memperlihatkan prevalensi anak penderita *stunting* usia di bawah lima tahun (Balita), dimana Timor Leste 48,8%; Indonesia 31,8%; Laos 30,2%; Kamboja 29,9%; Filipina 28,7%; Myanmar 25,2%; Vietnam 22,3%; Malaysia 20,9%; Brunei Darussalam 12,7%; Thailand 12,3%; dan Singapura 2,8%. Oleh karena itu, dalam data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia menduduki urutan kedua di Asia Tenggara yakni mencapai 31,8% pada 2020. Sementara prevalensi *stunting* tertinggi di Asia Tenggara ada di Timor Leste sebesar 48,8% dan Indonesia tertinggi kedua dengan prevalensi *stunting* sebesar 31,8%. Selain itu, Singapura menjadi negara dengan tingkat *stunting* paling rendah di Asia Tenggara yakni 2,8%.

Menurut *World Health Organization* (WHO), Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/*South-East Asia Regional* (SEAR). Rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dengan demikian, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Asian*

Development Bank and World Health Organization yang merupakan lembaga dibenua asia dan lembaga se-Asia Tenggara, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki tingkat prevalensi stunting yang sangat tinggi jika di bandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Oleh karena itu, untuk menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah di Indonesia harus mengambil kebijakan dan program secara tegas serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan maupun program-program itu dengan maksimal untuk meminimalisir tingkat stunting yang terjadi di Indonesia agar tidak menjadi negara dengan tingkat stunting sangat tinggi di Asia Tenggara lagi.

Selain itu, berdasarkan data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan yakni Dr. Dante Saksono Harbuwono saat acara *launching* hasil Studi Survei Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021 bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data prevalensi *stunting* di Indonesia tahun 2019-2021

No	Tahun	Persentase
1	2019	27,7
2	2020	31,8
3	2021	24,4

Sumber: (Shanti dan *Asian Development Bank*, 2021)

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020. Namun, tahun 2020 sampai tahun 2021 prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Balitbangkes terkait Dampak Pandemi terhadap Pelayanan Kesehatan yang menunjukkan bahwa hanya 19.2% puskesmas yang tetap melaksanakan posyandu, sementara pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dilakukan di posyandu (Kemenkes RI, 2021). Dengan demikian, terjadinya penurunan angka prevalensi *stunting* di Indonesia dapat dikatakan terjadi karena adanya hambatan dalam pendataan, sehingga kurang maksimal pelaksanaan dalam melakukan pendataan akibat pandemi COVID-19.

Dalam menghadapi permasalahan *stunting* yang ada di Indonesia dari dahulu sampai saat ini, maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa gerakan tersebut merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan dan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Tujuan umum peraturan ini untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Sementara tujuan khususnya yaitu meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, dan memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung guna menurunkan masalah gizi dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan (270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun). Selain itu, Perpres Nomor 42 Tahun 2013 juga bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus.

Dalam Pasal 6 Ayat 1 menjelaskan kegiatan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: kampanye nasional dan daerah; advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga; dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi; pelatihan; diskusi; intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik); intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan kegiatan lain (Presiden Republik Indonesia, 2013). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustuti Handayani (2019), bahwa “intervensi gizi spesifik merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang ditujukan khusus untuk kelompok seribu hari pertama kehidupan. Umumnya kegiatan ini dilakukan oleh sektor kesehatan seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di

posyandu, pemberian suplemen tablet besi-folat ibu hamil, promosi ASI eksklusif, MP-ASI dan sebagainya. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Intervensi gizi sensitif ini ditujukan untuk masyarakat umum, tidak khusus untuk seribu hari pertama kehidupan.

Dengan adanya permasalahan *stunting* di Indonesia peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi: Sebuah Tinjauan Literatur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia.
2. Mengetahui apa saja faktor penghambat kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi penelitian.
- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia.

2. Manfaat Akademik

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai implementasi kebijakan pada gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Kebijakan

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada disuatu negara memerlukan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, kebijakan menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk menangani permasalahan gizi kurang atau *stunting*. Pasalong dalam (Hidayaturrahman et al., 2020) menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip- prinsip tertentu. Kebijakan juga dapt didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Kebijakan menurut Graycar dalam Donovan dan Jackson dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja (Tresiana & Duadji, 2018). Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan menunjuk pad acara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Tresiana & Duadji, 2018).

Menurut Lilik Sabdaningtyas (2018) istilah kebijakan secara sederhana

dapat diartikan sebagai “pedoman untuk bertindak”. Kebijakan dalam maknanya seperti ini bisa berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Sabdaningtyas, 2018). Dengan kata lain kebijakan juga dapat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan acuan, pedoman, pegangan, dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul et al., 2016).

Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Turner dan Hulme memberikan serangkaian definisi kebijakan yang menunjukkan makna yang berbeda. Kebijakan atau *policy* dapat diartikan sebagai “label bagi suatu bidang kegiatan” seperti kebijakan ekonomi, kebijakan industri, kebijakan ketertiban dan hukum; dapat juga diartikan sebagai suatu “ekspresi tentang tujuan umum atau kondisi yang diinginkan”, seperti menciptakan pekerjaan sebanyak mungkin, mempromosikan demokratisasi melalui desentralisasi, atau membasmi akar kemiskinan; kebijakan juga dapat diartikan sebagai usulan atau “proposal khusus” seperti melakukan devaluasi nilai uang sebesar 10% atau memberikan pendidikan dasar secara gratis; kebijakan juga bisa dilihat sebagai “keputusan pemerintah” seperti keputusan presiden; juga dapat dilihat sebagai “otorisasi formal” seperti ketetapan parlemen; bisa juga didefinisikan sebagai “program” seperti program kesehatan wanita; sebagai *output* misalnya jumlah lahan yang didistribusikan dalam program “*land reform*”; sebagai *outcome* seperti income petani yang meningkat sebagai akibat dari program *land reform*, bisa juga diartikan sebagai “teori” atau model misalnya apabila insentif ditingkatkan maka output akan bertambah; dan juga sebagai “proses” seperti penetapan tujuan, pembuatan keputusan untuk implementasi dan evaluasi (Tresiana & Duadji, 2018).

Menurut Easton (Taufiqurakhman, 2014) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Selain itu, James E. Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dalam hal ini, suatu kebijakan dibuat sebagai reaksi terhadap masalah yang muncul.

Dari pengertian-pengertian mengenai kebijakan publik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada demi kepentingan masyarakat.

2.2. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan apabila di implementasikan dengan maksimal. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas atau kegiatan sebagai penghantar kebijakan dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pressman dan Wildavsky (dalam Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” yang artinya implementasi sebagai membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk

meperoleh hasil.

Pada dasarnya implementasi juga dikenal pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Tachjan (2006) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui suatu kebijakan yang tanpa ada pelaksanaannya, maka kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kebijakan publik. Menurut Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani (2017), pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Menurut Adiwisastra (Kadji, 2015) bahwa: “Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak berhasil dilaksanakan”. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa: berbeda dengan formulasi kebijakan publik yang mensyaratkan rasionalitas dalam membuat suatu keputusan, keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan. Dalam pernyataan tersebut juga sependapat dengan George Edward III yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya (Nurani, 2009).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Grindle dalam Wahab, implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier (Juwita, 2015), implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sementara itu, Purwanto dan Sulistyastuti (Ramdhani & Ramdhani, 2017) menyatakan bahwa “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver polity output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Menurut Situmorang, implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Situmorang, 2016). Dengan demikian, implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Dari penjelasan implementasi kebijakan oleh para ahli dan peneliti diatas, maka dapat disederhanakan bahwasanya implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat rentan terhadap hasil yang didapatkan dari pembuatan suatu kebijakan yang apabila kebijakan yang telah dibuat mampu dilaksanakan dengan maksimal maka hasil implementasinya juga akan baik bagi masyarakat dan birokrasi, namun sebaliknya apabila suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal maka hasil implementasinya akan berdampak tidak baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan harus dibuat dengan tepat untuk permasalahan yang tepat pula agar dapat

diimplementasikan, selain itu pengimplentasian kebijakan yang telah dibuat pun harus dilakukan dengan maksimal agar dapat mengatasi permasalahan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam melakukan pengimplentasian suatu kebijakan yang telah dibuat sangat membutuhkan teori yang tepat dalam menjalankan kebijakan itu. Implementasi merupakan tahapan atau proses yang mengubah gagasan ataupun program dalam kebijakan menjadi tindakan-tindakan. Terdapat beberapa model yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengimplementasian kebijakan publik agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Model-model tersebut antara lain:

a. Teori Merilee S. Grindle

Implementasi kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Menurut Mrilee S Grindle (Aziz, 2019) *content of policy* dan *context of implementastion* terdiri dari beberapa poin.

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang

ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
 - e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
 - f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. *Context of Implementation* terdapat 3 (tiga) poin yaitu :
- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
 - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan

dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

b. Teori Sabatier dan Mazmanian

Sabatier dan Mazmanian (Rahmawati, 2020) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis top-down dan bottom-up menjadi enam syarat yang dapat mencukupi dan harus ada agar implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan telah dinyatakan secara legal.

Sabatier dan Mazmanian mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen yaitu mudah-tidaknya suatu masalah dapat dikendalikan yang berkenaan dengan suatu indikator masalah teori dan teknis dalam pelaksanaan, objek, keragaman dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel intervening diartikan sebagai suatu kemampuan dalam kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan kejelasan.
3. Variabel dependen yaitu suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, hasil yang nyata,. Ketiga, penerimaan atas hasil nyata Ke-empat, kepatuhan terhadap objek. kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar

c. Teori Van Meter and Van Horn

Dalam teori Van Meter and Van Horn ini beranjak dari suatu argumen perbedaan-perbedaan dalam proses pengimplementasian yang

akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Van Meter and Van Horn (Rahmawati, 2020) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja (Rahmawati, 2020). Variabel-variabel tersebut, antara lain:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan diukur dari tingkat keberhasilannya dan juga ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran terlalu ideal, maka kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.

Van Meter dan Van Horn telah mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dengan menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya

Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga penting. Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Dalam Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian terhadap agen pelaksana yaitu sebagai organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen dalam pelaksana yang demokratis dan persuasif.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan public bias dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Meter dan Van Hort apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standard dan tujuan kebijakan, karena itu standard dan tujuan harus dikomunikasikan pada para pelaksana.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Hornt: “sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

d. Teori Edwards III

Edwards III (Rahmawati, 2020) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung

terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Menurut Edward III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*Resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

a. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini menyangkut kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

c. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melakukan kebijakan

d. Struktur birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

e. Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn

Model yang dikembangkan oleh Hogwood and Gunn ini dikenal dan sering disebut sebagai *The top down approach*. Menurut Hogwood dan Gunn (Fatih, 2010), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik dengan sempurna, maka diperlukan persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan keputusan yang sempurna.

f. Teori Ripley and Franklin

Randal B. Ripley and Grace A. Franklin (Fatih, 2010) menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation* sambil menyatakan:

“the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different annalist and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”

Dari penjelasan mereka, maka dapat terlihat bahwasanya terdapat tiga perspektif untuk mengukur keberhasilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Ketiga *measurement* tersebut, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*degree of complianc*)
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
3. Terwujudnya dampak yang dikehendaki.

g. Teori Soren C. Winter

Teori implementasi kebijakan publik yang dikenal sebagai *“integrated implementation model”* yang dikembangkan oleh Soren C. Winter. Model *integrated* menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Menurut Soren C. Winter (dalam Nurhijriah J et al., 2018), terdapat

variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organizational and interorganizational behavior*).

Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu.

Proses implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi ditandai oleh adanya komitmen dan koordinasi (Winter dalam Rahmawati, 2020). Dalam tataran implementasi, komitmen dimaksudkan adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program. Sementara pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi.

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah (*Street Level bureaucratic behavior*)

Faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Pekerja level bawah ini pada prinsipnya mempunyai pilihan pada hasil mana yang harus dicapai, dan bagaimana cara melakukannya. Demikian halnya tokoh masyarakat, lembaga adat, konselor dan semacammnya, secara rutin berhubungan dengan birokrasi level bawah.

3. Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*).

Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) yang tidak

hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Menurut Winter variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori implementasi kebijakan publik diatas, maka dalam fokus penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III yang menyatakan terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan dan peneliti juga menggunakan teori Soren C. Winter yang menyatakan terdapat tiga variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Alasan peneliti menggunakan dua teori yaitu agar dalam melakukan penelitian hasilnya dapat terjawab dan diperkuat dengan menggunakan dua teori tersebut. Selain itu, implementasi kebijakan publik Edward III bersifat *Top-Down*, yang berarti program tersebut dicanangkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara gizi pada anak dan kepatuhan masyarakat terhadap pemberian gizi untuk menurunkan tingkat *stunting*.

2.3. Tinjauan tentang Penanganan *Stunting*

2.3.1. Pengertian *Stunting*

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Halentina, 2019) mendefinisikan *stunting* sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi (0 – 11 bulan) dan anak

balita (12 – 59 bulan) akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir, tetapi kondisi *stunting* baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi (Apriluana & Fikawati, 2018). Menurut *World Health Organization (WHO) Child Growth Standart*, stunting didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan karena malnutrisi yang terjadi pada anak-anak berusia dibawah lima tahun (Rahayu et al., 2018). Stunting juga didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana keadaan tubuh pendek atau sangat pendek yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dengan ambang batas (zscore) antara -3 SD sampai dengan < -2 SD (Olsa et al., 2017).

Dengan beberapa pengertian beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *stunting* adalah suatu gangguan dalam pertumbuhan tubuh pada bayi dan anak yang dapat menyebabkan panjang maupun tinggi badan menjadi pendek atau sangat pendek.

2.3.2. Faktor Penyebab *Stunting*

Stunting dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu kurangnya asupan gizi anak saat didalam kandungan atau saat dilahirkan dalam jangka 2 tahun. Dapat dikatakan demikian, karena pada periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas. Periode ini merupakan periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen.

Menurut Nova Dwi Yanti, Feni Betriana dan Imelda Rahmayunia Kartika (Yanti et al., 2020) terdapat tiga faktor penyebab *stunting*, yaitu:

1. Pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua

Menurut Nova Dwi Yanti, Feni Betriana & Imelda Rahmayunia Kartika, pendidikan ibu secara tidak langsung berhubungan dengan *stunting* terkait dengan pengambilan keputusan terhadap gizi dan perawatan kesehatan. Ibu dengan pendidikan lebih baik akan lebih mempertimbangkan gizi yang baik untuk anak. Selain itu, pola asuh yang tidak tepat juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap resiko terjadinya *stunting*.

2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan status gizi

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Saaka & Galaa, 2016), didapatkan bahwa berat lahir rendah merupakan faktor resiko yang paling konsisten terhadap *stunting*. Penelitian serupa oleh Nadiyah (2012) juga memperlihatkan bahwa BBLR merupakan faktor resiko yang paling dominan terhadap kejadian *stunting* pada anak.

Lingkungan pra kelahiran yang merupakan pertumbuhan saat masa janin dapat dilihat dari indikator berat badan lahir (Nadiyah et al., 2014) dan berdampak pada pertumbuhan anak setelah lahir. Hal ini mengindikasikan urgensi perhatian terhadap status gizi ibu saat hamil.

3. Status ekonomi keluarga.

Balita dari keluarga dengan pendapatan perkapita kurang memiliki resiko 5,385 kali mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita dari keluarga dengan pendapatan cukup (E. N. Aini et al., 2018).

2.3.3. Penanganan *Stunting*

Upaya percepatan perbaikan gizi merupakan upaya global tidak saja untuk Indonesia melainkan semua negara memiliki masalah gizi *stunting*. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dibentuklah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2013 yang membahas mengenai Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi. Selain itu, upaya pemerintah dalam menangani *stunting* juga dibentuknya kebijakan perbaikan gizi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya

Perbaikan Gizi. Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan masyarakat yang mempunyai program prioritas yang dituangkan kedalam rencana strategis (renstra) pembinaan gizi masyarakat tahun 2015-2020 dengan menekankan pada seribu hari pertama kehidupan melalui pendekatan kesehatan keluarga. Dengan melalui kebijakan maupun program yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk melakukan penanganan stunting, maka upaya selanjutnya yang harus dan sangat penting diperhatikan dengan melihat pelaksanaan kebijakan yang telah ada dan juga implemetasi program-program maupun kegiatan yang sudah diatur agar dapat meminimalisir tingkat stunting baik dalam lingkup provinsi, kabupaten/kota, daerah maupun lingkup nasional.

2.4. Kerangka Berpikir

Di Indonesia terus menyerukan dan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program seribu hari pertama kehidupan (HPK). Hal itu, karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bahwa kualitas manusia ditentukan sejak awal janin bertumbuh di dalam tubuh seorang ibu. Untuk menghadapi hal tersebut, maka setiap bayi yang baru saja lahir akan diukur berat dan panjang tubuhnya, dan dipantau terus menerus terutama di periode emas pertumbuhannya, yaitu 0 sampai 2 tahun. Dimana berat badan ideal bayi saat dilahirkan adalah tidak kurang dari 2500 gram, dan panjang badan bayi tidak kurang dari 48 cm (Wahyuningrum, 2020).

Dengan masih tingginya tingkat *stunting* di Indonesia, pemerintah melakukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut agar dapat meminimalisir angka *stunting* dengan mengeluarkan kebijakan perbaikan gizi

yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi. Kebijakan tersebut salah satunya berfokus pada program seribu hari pertama kehidupan yang diterapkan disetiap provinsi ataupun berbagai daerah yang ada di Indonesia.

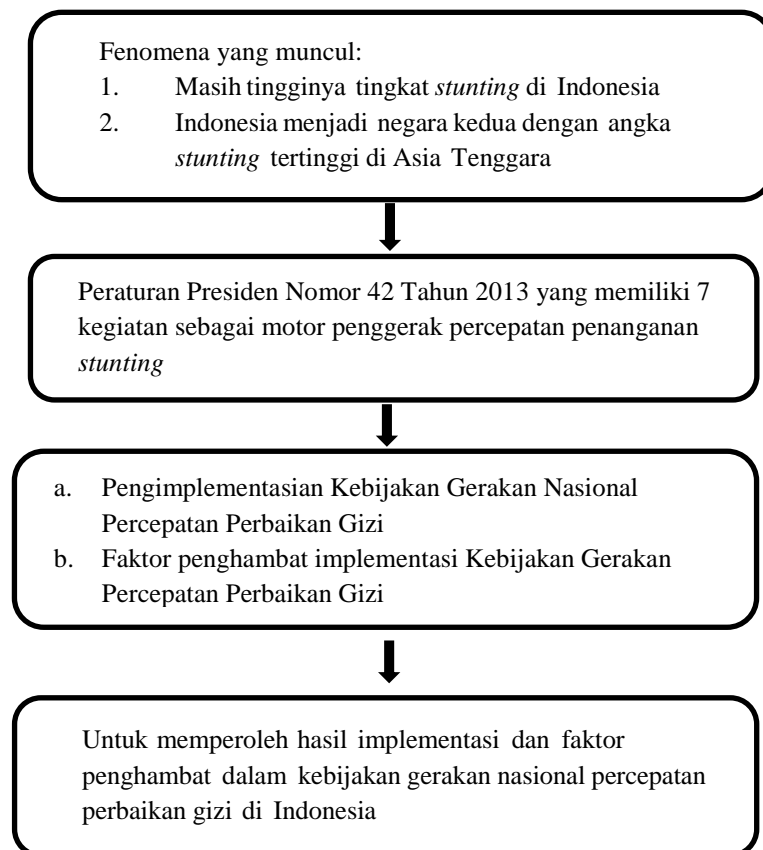
Melalui kebijakan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dengan tujuh kegiatan untuk menangani *stunting* di Indonesia, masih adanya permasalahan dalam implementasi kegiatan-kegiatan dalam kebijakan tersebut. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* dalam Agustino (Suchmasasi, 2021) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang. Kebijakan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mengatur proses implementasinya. Keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Marrile S Grindle dalam Agustino (Suchmasasi, 2021) mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari: pertama, prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya dengan merujuk pada aksi kebijakan. Kedua, dengan melihat apakah tujuan kebijakan tercapai dengan merujuk impact dan tingkat perubahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia dengan menggunakan studi implementasi kebijakan. Kajian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan serta faktor penghambat dalam pengimplementasian. Untuk mengetahui keberhasilan dan faktor penghambat implementasi kebijakan, peneliti mengkaji dua pokok bahasan, yang dirumuskan dalam rumusan masalah:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia?;
- 2) Apa saja faktor penghambat dalam

pengimplementasian kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi? Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, peneliti menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari analisis data akan diketahui pelaksanaan kebijakan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi dengan melalui program seribu hari pertama kehidupan di Indonesia. Secara lebih ringkas, kerangka berpikir tersebut digambarkan dalam bagan alur berpikir berikut:



III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan jenis riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka (*literatur review*). Menurut Mestika Zed, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2018). Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015). Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian studi pustaka bukan hanya suatu kegiatan membaca dan mencatat data yang diperoleh, melainkan penelitian studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Adapun jenis dan metode yang digunakan para peneliti untuk melakukan *literature review* atau tinjauan pustaka terbagi menjadi empat metode, yaitu:

1. *Traditional Review*
2. *Systematic Mapping Study* (Scoping Study)
3. *Systematic Literature Review* atau *Systematic Review*
4. *Tertiary Study*

Dalam studi pustaka atau *literature review* yang digunakan dalam peneliti ini yakni *systematic literature review* atau sering disingkat SLR atau disebut tinjauan pustaka sistematis adalah metode *literature review* yang

mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan sebelumnya (Suroso, 2020). Metode SLR dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses *literature review* terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subyektif dari penelitiannya.

Ada beberapa alasan penelitian ini menggunakan studi literature atau riset kepustakaan, antara lain adalah: pertama, keterbatasan untuk wawancara secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini di buat. Hal ini dikarenakan wabah virus Corona (Covid-19) di beberapa daerah yang masih belum membaik dan juga hal lainnya yang membuat ruang gerak terbatas. Kedua, keterbatasan wawancara secara langsung dengan narasumber karena lokus penerlitian yang luas, yaitu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, era digitalisasi membuat banyak instansi atau organisasi mempublikasi laporan-laporan dan hasil penelitian secara elektronik sehingga data pustaka tetap andal untuk menjawab masalah penelitian. Menurut Mirzaqon dan Purwoko dalam (M. Sari & Asmendri, 2020) bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Sementara itu, *systematic literatur review* atau tinjauan pustaka sistematis (TPS) cenderung mengikuti pertanyaan penelitian dan bertujuan untuk menjawabnya dengan cara terbaik. Dengan itu akan tercapai kesimpulan dan menunjukkan pengetahuan secara luas tentang topik tertentu.

Penelitian ini menggunakan TPS karena bisa menghasilkan hasil sintesis karya-karya sebelumnya dan membantu mengkonsolidasikan literatur yang ada. Menurut Kraus dkk, TPS juga menawarkan kemungkinan penggabungan literatur yang ada dan membuat definisi sekaligus dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut, bisa berupa kesenjangan (*gap*) penelitian dan juga pertanyaan atau masalah apa yang dapat dijawab oleh penelitian. Selain itu, menurut Tranfield dkk bahwa TPS mempunyai transparansi dalam pengumpulan dan sintesis data, sehingga menghasilkan tingkat obyektivitas

dan reproduksibilitas yang lebih tinggi (Kurniawan, 2020).

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dipilihnya pendekatan kualitatif karena menurut peneliti, pendekatan ini mempunyai karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode deskriptif analisis digunakan dengan alasan data dan informasi yang dikumpulkan memusatkan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan dan penarikan kesimpulan.

Kemudian hasilnya berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang dikaji. Penelitian ini berawal dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan bersifat fleksibel atau dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.

Menurut Sugiyono dalam (Suparno, 2015), pendekatan kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan secara alamiah (*natural setting*). Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Sementara itu, menurut Moleong dalam (Sidiq & Choiri, 2019), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif merupakan proses inquiri yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan atau opini informan yang semuanya itu berjalan dalam latar situasi alamiah wajar

(*natural setting*) (Rochiati, dalam Iis Istianah, 2017). Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sebagian besar orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Oleh sebab itu, instrument utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sebagai *human instrument* yang berfungsi juga dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, dalam Suparno, 2015).

Secara umum, pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif lainnya, yang menjadi pembeda hanyalah sumber data dan informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang berasal dari buku, artikel jurnal, laporan resmi, berita online dan website pemerintah.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Suyanto (2010), sebelum memulai semua tahap penelitian kualitatif, hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan *research question*. *Research question* dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian, yaitu pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian tersebut. Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, khususnya pada saat pengumpulan data. Hal ini untuk menentukan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Fokus penelitian kebijakan pada program seribu hari pertama kehidupan dalam penanganan *stunting* di Indonesia adalah:

1. Pengimplementasian kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang mengambil fokus utama kegiatannya yakni dengan

menggunakan tiga elemen, yaitu komunikasi, sumber daya dan perilaku kelompok sasaran.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam melakukan kegiatan intervensi gizi langsung (spesifik); intervensi gizi secara tidak langsung (sensitif); kampanye nasional dan daerah; advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga; dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi; pelatihan; diskusi; dan kegiatan lainnya.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan *systematic literatur review* atau tinjauan pustaka sistematis (TPS). Maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, seperti *google research*, *google scholar* dan *research gate*.

Dalam *systematic literature review* atau sering disingkat SLR atau dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis (TPS) yang diartikan menurut Kitchenham dan Charters adalah metode *literature review* yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan sebelumnya (Kurniawan, 2020). Metode SLR dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses *literature review* terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subjektif dari penelitiannya. Untuk jenis data dalam penelitian ini diantaranya artikel jurnal, buku, paper jurnal dan lain sebagainya.

Penelitian ini membahas tentang kegiatan-kegiatan dalam kebijakan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus utama pada intervensi gizi secara langsung serta juga membahas kegiatan lainnya, yang mencakup kegiatan kampanye nasional dan daerah; advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga; dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi;

pelatihan; diskusi; intervensi gizi secara tidak langsung (sensitif) dan kegiatan lainnya dalam penanganan *stunting* sebagai objek penelitian sehingga sumber data pokok yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah berkaitan dengan sumber data. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *systematic literatur review* (Latifah & Ritonga, 2020).

Menurut Kitchenham dan Charters 2007 *systematic literature review* (SLR) merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan penelitian tertentu.

Dalam teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan teknik umum tinjauan pustaka sistematis yaitu teknik SALSA (Search, Appraisal, Sythesis, Analysis) (Mengist et al., 2020) dan juga dimodifikasi dengan adaptasi dari tinjauan pustaka sistematis yang dilakukan oleh Indarti et al., (2020).

Data base penelitian yang digunakan untuk penelusuran artikel publikasi adalah *google search*, *google scholar*, dan *research gate*. Aplikasi yang digunakan adalah *mendeley*, dan *google chrome*. Kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel jurnal adalah gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, program seribu hari pertama kehidupan, penanganan *stunting*, faktor penyebab terjadinya *stunting* dan pencegahan terjadinya *stunting*. Kata kunci tersebut digunakan dalam bahasa Indonesia.

Jurnal yang sesuai dengan inklusi dan terdapat tema *stunting* kemudian dilakukan review. Kriteria inklusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Inklusi

Kriteria	Inklusi
Jangka Waktu	Jurnal tahun 2015-2021
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Jenis Jurnal	Artikel Penelitian, Full text
Isi	Penanganan <i>stunting</i>

Sumber: diolah oleh peneliti

3.6. Langkah Systematis Literature Review

Menurut Denyer & Tranfield (2009) secara keseluruhan terdapat 4 (empat) langkah besar yang harus dikerjakan pada proses tinjauan pustaka sistematis (Kurniawan, 2020). Proses ini ditujukan agar lebih sistematis, transparan, bisa direplikasi untuk proses identifikasi, pemilihan, analisa dan proses sintesisnya. Keempat proses tersebut juga sering disebut SALSA (*Search, Appraisal, Synthesis, Analysis*) (Mengista et al., 2020). Keempat proses tersebut adalah pencarian pustaka (*searching for material*), kedua adalah appraisal atau evaluasi dan seleksi, yang ketiga adalah synthesis dan keempat adalah proses analisa (*analysis*). Berikut langkah-langkah dalam tinjauan literature review pada penelitian ini:

3.6.1. Langkah 1 : Pencarian Pustaka (*Search*)

Pada proses TPS yang pertama yaitu Search atau pencarian pustaka. Langkah awal adalah membuka halaman website dari *google scholar* dan *research gate*. Kemudian pilih fasilitas atau fitur pencarian (*Search*). Kotak teks (*text field*) diisi dengan kata kunci yang sudah direncanakan, yaitu implementasi kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi atau implementasi seribu hari pertama kehidupan dan dengan mencantumkan *stunting* dalam pencarian. Untuk

pilihan *dropdown*, tipe yang dicari adalah abstract, title, keywords. Untuk pilihan fitur “Limit” diisi dengan sesuai inklusi dan eksklusi kriteria. Setelah dilakukannya pencarian menghasilkan sebanyak 372 penelitian. Yang terdiri dari artikel jurnal, skripsi dan buku.

3.6.2. Langkah 2 : Seleksi Artikel (*Appraisal*)

Langkah berikutnya adalah *appraisal* atau seleksi artikel dari total 372 yang sudah dihasilkan dari langkah pertama. Untuk menguatkan nilai ilmiah dari penelitian, maka hasil TPS harusnya hanya memakai artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi serta sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Berikut ini kriteria data yang dikatakan layak menjadi sumber data penelitian, yaitu:

1. Data yang diperoleh memiliki rentang waktu dari tahun 2015 sampai 2021 dan memiliki publikasi jenis artikel jurnal
2. Data yang diperoleh bersumber dari *google search*, *google scholar*, *web pemerintah*, dan *research gate*
3. Data yang digunakan hanya dalam bentuk artikel dan paper jurnal yang berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 dan faktor penghambat pengimplementasian kegiatan tersebut sebagai bagian dari kegiatan yang ada dalam kebijakan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi.

Dalam seleksi artikel jurnal ini, dilakukan secara manual oleh peneliti dengan mengeliminasi artikel-artikel yang tidak sesuai dengan kriteria maupun ketentuan yang telah penulis tetapkan agar terhindar dari hasil yang bias. Sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut telah dihasilkannya 57 (lima puluh tujuh) artikel jurnal.

3.6.3. Langkah 3 : Digitalisasi Artikel (*Synthesis*)

Langkah ketiga ini adalah *synthesis*, yaitu menyalin 57 artikel jurnal yang sudah diseleksi ke dalam table, dengan memetakan detail dari artikel, mulai dari penulis, judul, tahun penelitian, dan publikasi jenis jurnal. Salah satu tujuan dari pemetaan digital ini adalah untuk mempermudah mengklaster secara manual dan menyaring (filter) dari 57 jurnal yang telah didapatkan.

3.6.4. Langkah 4 : Analisa Data (*Analysis*)

Langkah keempat adalah proses analisa data. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya akan dianalisis pada tahap ini. Hasil yang telah dianalisa akan menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penjelasan (Creswell, 2016) yang menumpukkan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan dan pembuatan catatan, pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema. Berikut penjelasannya:

1. Pengorganisasian data, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu: artikel jurnal, buku atau e-book, dan dokumen dari website lembaga/organisasi, serta data dari website media online.
2. Membaca dan membuat catatan. Data-data mentah tersebut kemudian dibaca untuk membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, penulis juga mencatat gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Pendeskripsian. Pada tahap ini, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi riil di lapangan secara detail.

4. Pengklarifikasian. Pada bagian ini, peneliti menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali dalam narasi/laporan.
5. Menfasirkan data menjadi kode dan tema. Pada tahap ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitian membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya yang didukung dengan teori yang relevan.
6. Penarikan kesimpulan. Data yang sudah dianalisis kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan masalah.

Dalam penarikan kesimpulan pada data, peneliti melihat tujuh kegiatan yang ada dalam kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, kemudian peneliti menggolongkannya ke tiga elemen yang telah ditetapkan dalam fokus penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Penelitian Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian, dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas berkenaan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2016). Jadi, keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pengujian Kredibilitas (*Credibility*)

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguji kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan:

- a. Meningkatkan Ketekunan

Cara pengujian ini dilakukan dengan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian, kepastian data dan

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, data dapat dicek kembali untuk memastikan kebenaran data yang sudah ditemukan sehingga peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang objek yang diamati.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.

2. Pengujian Kebergantungan proses penelitian. Untuk mengecek kebenaran hasil penelitian, maka peneliti akan selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Sehingga peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Sehingga peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan. Uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan
3. Pengujian Kepastian (*Confirmability*)
Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada akan tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Pemeriksaan dilakukan oleh pembimbing berkaitan dengan kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan, penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengimplementasian Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi yang terdiri dari tujuh kegiatan yakni kampanye nasional dan daerah, advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga, dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi, pelatihan, diskusi, intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Berdasarkan hasil review artikel jurnal yang didapatkan dengan menggunakan *google scholar*, *research gate* dan *google search*, maka peneliti menganalisis implementasi ketujuh kegiatan yang ada dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tersebut dengan menggunakan tiga elemen, yaitu komunikasi, sumber daya dan perilaku kelompok sasaran. Dalam menentukan komunikasi pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, peneliti melihat empat kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan komunikasi, yaitu kampanye nasional dan daerah, advokasi dan sosialisasi lintas sector dan lintas lembaga, dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi dan diskusi. Dari keempat kegiatan tersebut, maka dapat dilihat bahwasanya komunikasi telah dilakukan dengan maksimal; dan untuk melihat sumber daya dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam kebijakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013, peneliti melihat tiga elemen, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Dari hal tersebut, peneliti memperoleh hasil yang maksimal; serta dalam perilaku kelompok sasaran dengan melihat sebagian besar hasil artikel jurnal yang menunjukkan sikap positif dengan mengikuti berbagai kegiatan dalam pencegahan *stunting*, maka dapat dikatakan bahwa perilaku pihak sasaran kebijakan Perpres Nomor 42

Tahun 2013 bersifat positif.

Tujuh kegiatan dalam kebijakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh sebagian besar daerah Indonesia dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan 57 hasil review jurnal yang diambil oleh peneliti, selain itu dalam hasil review artikel jurnal menunjukkan terdapat beberapa daerah yang ada di Indonesia yang implementasinya kurang maksimal dan bahkan masih terdapat daerah yang belum melaksanakan ketujuh kegiatan tersebut karena terdapat hambatan baik dari sudut lokasi, pemerintah daerah, tenaga kesehatan atau sumber daya manusia maupun masyarakat yang tidak mendukung.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kebijakan gerakan percepatan perbaikan gizi, antara lain: Kurangnya dukungan dari petugas kesehatan dan sarana kesehatan pada puskesmas dan posyandu, masih rendahnya partisipasi masyarakat ke Posyandu, kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat terkait kualitas asupan atau dampak *stunting*, pertumbuhan ekonomi belum merata, kondisi geografis wilayah, dan tidak adanya anggaran khusus untuk pencegahan *stunting*.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran atau rekomendasi yang penulis ajukan adalah:

1. Saran Akademis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan agar hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber informasi dan sumbangan pemikiran guna mengembangkan keilmuan analisis implementasi kebijakan khususnya pada kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dan penghambat kebijakan tersebut.
 - b. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam analisis implementasi kebijakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013. Arah untuk penelitian selanjutnya diharapkan muncul penelitian tinjauan pustaka

sistematis lanjutan yang lebih baik lagi, terutama yang membahas tentang analisis implementasi kebijakan ini dengan menggunakan aspek lainnya dalam menilai pelaksanaan ketujuh kegiatan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di Indonesia.

2. Saran Bagi Masyarakat

- a. Mengoptimalkan upaya preventif atau pencegahan untuk menghindari adanya stunting dan tetap menjaga kesehatan keluarga;
- b. Mengupayakan pencegahan sejak dini melalui penguatan fungsi keluarga karena faktor risiko penyebab stunting lebih cenderung berasal dari individu dan lingkungan keluarga. Fungsi keluarga yang berjalan dengan baik dan optimal dalam memenuhi kebutuhan anak dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Saran Stakeholders

- a. Penguatan kerjasama semua stakeholder (pemerintah dan pihak lintas sektor) melalui kegiatan-kegiatan dalam kebijakan yang telah dibuat;
- b. Memaksimalkan kampanye digital terutama di media sosial karena trend sekarang, hampir semua masyarakat menggunakan sosial media. Selain itu, biaya lebih murah dan adanya komunikasi dengan khalayak;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami mengenai stunting, baik penyebab maupun faktor bahaya stunting dan cara mencegahnya serta masyarakat memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam. Selain itu dibutuhkan penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan petugas posyandu yang harus berada di garda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya kesehatan (status gizi) rumah tangga terutama calon ibu hamil dan anak sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk tercapainya pencegahan *stunting*.
- d. Pemerintah perlu mengupayakan skema bantuan pendanaan kepada organisasi dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, K. T., Widarini, N. P., Sutiari, N. K., Ulandari, L. P. S., & Adnyana, I. M. S. (2021). Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Pencegahan Stunting Melalui Penerapan Praktek Promosi Makanan Pendamping ASI (MPASI) Optimal. *Buletin Udayana Mengabdi*.
- Agritubella, S. M., & Delvira, W. (2020). Efektifitas Poster Pola Diit 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terhadap Pengetahuan Ibu Hamil tentang Nutrisi dalam Pencegahan Stunting di Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*.
- Aini, E. N., Nugraheni, S. A., & Pradigdo, S. F. (2018). Faktor yang mempengaruhi stunting pada balita usia 24-59 bulan di Puskesmas Cepu Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6*, 454–461.
- Aini, R. N., Tamtomo, D. G., & Hanim, D. (2018). Penelitian Anemia Pada Siklus 270 Hari Pertama Kehidupan Dan Usia Ibu Dengan Berat Bayi Lahir Rendah. *MGMI*.
- Ana, K., Norfai, & Indah, M. F. (2021). Edukasi Gizi Spesifik Sebagai Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Dalam Upaya Pencegahan Stunting Balita Pada Siswi di SMK Farmasi Al Furqan Banjarmasin. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK), 1*.
- Andarwulan, S., Iswati, R. S., Rihardini, T., & Anggraini, D. T. (2020). Penerapan Teknologi Deteksi Dini Stunting Sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi Anak Di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya. *Journal of Political Issues*.
- Ansari, Ummah, I. R., Kustrianingsih, T., & Jannah, R. R. (2021). Mencegah Stunting Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengasuhan Seribu Hari Pertama Kehidupan (Hpk) Di Masa Covid-19 Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap

Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Litbangkes*, 28.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22435/mpk.v28i4.472>

Asian Development Bank. (2021). *Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi ke-2 di Asia Tenggara*. Databoks.

Assriyah, H., Indriasari, R., Hidayanti, H., Thaha, A. R., & Jafar, N. (2020).

Hubungan Pengetahuan, Sikap, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Psikologis, Dan Inisiasi Menyusui Dini Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Sudiang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Astari, P., Rinonce, H. T., Pudjohartono, M. F., Debora, J., Winata, M. G., &

Kasim, F. (2018). Anemia pada ibu hamil peserta Program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Agats, Asmat, Papua: Prevalensi dan analisis faktor risiko. *Journal of Community Empowerment for Health*.

Astuti, Y., & Widayatun. (2021). Pola pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan dan status gizi anak bawah dua tahun (baduta) di Kota Medan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16, 1.

Aziz, M. I. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.

Berawi, K. N., RWP, R., Karimah, N., & Fiana, D. N. (2020). Edukasi Pola Pangan Harapan Bagi Keluarga Untuk Menurunkan Kasus Balita Stunting Di Ibu Ibu Pkk Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Dahliansyah, Hanim, D., & Salimo, H. (2018). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif, Status Gizi, dan Kejadian Diare dengan Perkembangan Motorik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. *Sari Pediatri*.

Dhirah, U. H., Rosdiana, E., Anwar, C., & Marniati. (2020). Hubungan Perilaku Ibu Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan Dengan Status Gizi Baduta Di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*.

Direktorat Promoosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. (2018). *Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting*.

file:///E:/fix/REF HASIL PAPARAN-STUNTING-DIR.-

PROMKES_1225.pdf

- Dukcapil. (2021). *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021*. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Ernawati, A. (2019). Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Anak Balita Di Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati. *Jurnal Kesehatan*, 2.
- Fatih, A. Al. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Unpad Press.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*.
- Fitriani, & Yarmaliz. (2020). Perbedaan Perilaku Feeding Practice Ibu Baduta Terhadap Preventif Stunting 1000 Hari Pertama Kehidupan. *Jurnal Kesehatan*.
- Gurning, F. P., S, R. Y. S., Astuti, R. W., & Sinambela, U. B. M. (2020). Implementasi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*.
- Haerul, Haedar, & Hamdan, A. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6.
- Halentina, S. R. (2019). Masalah Gizi Buruk Mengakibatkan Stunting di Indonesia. *Departement of Pancasila and Citizenship Education*.
- Handayani, A. (2019). *Evaluasi Kebijakan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Penanganan Stunting Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung*. Universitas Bandar Lampung.
- Handayani, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Badan Litbang Kementerian Kesehatan RI*, 4.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240>
- Hardani, Pertiwi, A. D., Atikah, N., Idawati, S., Utami, E. F., & Rahmawati, S. (2021). Pendampingan Ibu Hamil Dalam Kegiatan Aksi Seribu Hari Pertama

- Kehidupan (ASHAR). *Jurnal Karinov*.
- Harini, I. M., Lestari, R. D. W. D., Agustina, N. N., Gumilas, N. S. A., Nafiisah, Ernawati, D. A., & Wicaksono, R. B. (2020). Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Sokaraja Tengah Dalam Pencegahan Stunting Pada Anak Melalui Pemberian Pengetahuan Tentang Pentingnya Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Harma Wati, A., Huriyati, E., Nisa, A., Edyanto, A. S., & Anindyah, D. S. (2017). Peningkatan Pengetahuan Kesehatan dan Ketrampilan Pengukuran Status Gizi Remaja melalui Pembentukan dan Pelatihan Kader Remaja Masjid Jogokariyan. *Naskah Lengkap Kongres Nasional VII Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia*.
- Hidayaturrahman, M., Moerod, M., Laily, N., Wisman, Y., Goa, L., Derung, T. N., Sugiantiningsih, A. A. P., Yahya, Agusrianto, E., & Handayani, E. (2020). *Teori Sosial Empirik*. Edulitera (Anggota IKAPI).
- Irmaida, Briawan, D., & Martianto, D. (2021). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Percepatan Penurunan Stunting: Studi Kualitatif Di Kabupaten Bogor. *National Nutrition Journal*.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga.
- Juwita, R. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Metode Sasaran Kerja Pegawai Dalam Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum)*. Universitas Lampung.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press Gorontalo.
- Kemendes RI. (2018). *Penurunan Stunting Jadi Fokus Pemerintah*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI, 2017. (2017). *Kualitas Manusia Ditentukan Pada 1000 Hari Pertama Kehidupannya*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. In S. Eka Satriani Sakti (Ed.), *Pusat Data dan Informasi*. Buletin Jendela

Data dan Informasi Kesehatan.

- Kurniawan, Y. (2020). *Fashion Halal Dan Konsumerisme : Isu Dan Tantangan (Pendekatan Systematic Literature Review)*. Universitas Airlangga.
- Latifah, L., & Ritonga, I. (2020). Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763>
- Mayasari, D. I. (2018). Evaluasi Program Gerakan 1000 HPK dalam pencegahan stunting di wilayah puskesmas Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2018. *Skripsi Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan*.
- Mengista, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>
- Mubasyiroh, L., & Aya, Z. C. (2018). Hubungan Perilaku Ibu Dalam Pemenuhan Gizi Pada Anak 1000 Hari Pertama Kehidupan/ Golden Period Dengan Status Gizi Balita Di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Tahun 2018. *Health Sciences Journal*.
- Mulianingsih, M., Yilanda, H., Widiastuti, N. A., & Hayana, H. (n.d.). Media Permainan Ular Tangga Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Stunting di Polindes Gerung Utara Puskesmas Gerung Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*.
- Nadiyah, Briawan, D., & Martianto, D. (2014). Faktor risiko stunting pada anak usia 0— 23 bulan di Provinsi Bali, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Risk Factors of Stunting among 0—23 Month Old Children in Bali Province, West Java and East Nusa Tenggara). *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 9, 125—132.
- Naim, R., Juniarti, N., & Yamin, A. (2017). Pengaruh Edukasi Berbasis Keluarga terhadap Intensi Ibu Hamil untuk Optimalisasi Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. *JKP*.
- Nasrudin, A. (2020). Kota Bandar Lampung Dalam Angka. In B. K. B. Lampung (Ed.), *Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung*.

- Nurani, D. (2009). *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Jakarta Selatan*. Universitas Indonesia.
- Nurhijriah J, S., Setiawati, B. dan, & Kasmad, R. (2018). Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.
- Nurlaela, D., Sari, P., Martini, N., Wijaya, M., & Judistiani, R. T. D. (2018). Efektivitas Pendidikan Kesehatan Melalui Media Kartu Cinta Anak Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jatinangor. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 2.
- Nursanti, D., Jati, S. P., & Rahfiludin, M. Z. (2019). Analisis Pemetaan Stakeholder Dalam Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Kota Semarang Tahun 2017. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*.
- Olsa, Anas, & Sulastri. (2017). Hubungan Sikap dan Pengetahuan Ibu Terhadap Kejadian stunting pada Anak Baru Masuk Sekolah Dasar di Kecamatan Nanggalo. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6, 523–529.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 1.
- Pratama, I. S., Aini, S. R., & Maharani, B. F. (2019). Implementasi GASING (Gerakan Anti Stunting) Melalui Phbs Dan Pemeriksaan Cacing. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*.
- Purwati, H., Khusniyati, E., SB, E. M., & Ibnu, F. (2020). Pelatihan Kader Kelas Ibu Hamil “Persiapan 1000 Hari Pertama Kehidupan” di Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *The Journal of Innovation in Community Empowerment*, 2.
- Rahayu, R. M., Pamungkasari, E. P., & Wekadigunawan, C. (2018). The Biopsychosocial Determinants of Stunting and Wasting in Children Aged 12-48 Months. *Journal of Maternal and Child Health*, 3.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26911/thejmch.2018.03.02.03>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah*

- Kesehatan Sandi Husada*, 11. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Rahmat, & Rosali, H. (2020). Pengaruh Promosi Kesehatan Tentang Mempersiapkan Generasi 1000 Hpk Terhadap Motivasi Melakukan Pemeriksaan Rutin Kehamilan Di Puskesmas Rangas Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Kesehatan*.
- Rahmawati, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Ramadani, E., & Oktavia, W. (2021). *Angka Stunting Balita di Indonesia Masih Tinggi*. ITS Online.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11.
- Renata, E., Suryawinata, M., & Agustina, D. K. dan I. F. (2019). Optimalisasi 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) di Desa Balongtani Kecamatan Jabon Sidoarjo. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*.
- Rokhaidah, Wahyudi, C. T., & Florensia, L. (2021). Cegah Stunting Pada Anak Melalui Gerakan Ibu Sadar 1000 HPK. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*.
- Saaka, M., & Galaa, S. Z. (2016). Relationships between Wasting and Stunting and Their Concurrent Occurrence in Ghanaian Preschool Children. *Journal of Nutrition and Metabolism*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1155/2016/4654920>
- Sabdaningtyas, L. (2018). Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22.
<https://doi.org/http://journal.uny.ac.id/index.php/jpep>
- Safitri, A. (2018). Kesiapan Remaja Puteri Dalam Menghadapi 1000 Hari Pertama Kehidupan Ditinjau Dari Kualitas Dan Kuantitas Konsumsi Pangan. *Journal of The Indonesian Nutrition Association*.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan*

IPA, 6.

- Sari, T. P., Simanjuntak, B. Y., & Jumiyati, J. (2019). Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Melalui Edukasi Flipchart 1000 HPK. *Jurnal Litbang*.
- Shanti, H. D. (2021). *BKKBN: Angka prevalensi stunting jadi 24,4 persen pada akhir tahun*.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Suchmasasi, Y. (2021). *Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia (Studi Implementasi Kebijakan)*. Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sulistiyono, P., & Jaenudin. (2021). Kajian Kesiapan Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Cirebon. *Jurnal Dinamika Pembangunan*.
- Sunaryo, D. R., Candradewini, & Arifianti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*.
- Suparno. (2015). Peran Nilai-Nilai Religius Kerajaan Sintang Dalam Membina Karakter Generasi Muda. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Supriyatni, N., Andiani, Rahayu, A., Mansyur, S., Surasno, D. M., Lestari, T., Musiana, & Djafar, M. A. H. (2021). Kolaborasi Cegah Stunting dengan Mempersiapkan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Jambula. *Jurnal BIOSAINSTEK.*, 2.
- Suroso, J. S. (2020). Literature Review. *BINUS University*.
<https://mmsi.binus.ac.id/2020/10/24/literature-review-ii-jarot-s-suroso/>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. dan C. P. Mariana (ed.)). AIPI Bandung.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

- Tresiana, N., & Duadji, N. (2018). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Wahyuningrum, E. (2020). *Hubungan Berat Badan Lahir Panjang Badan Lahir Dan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Gatak*.
- Welianto, A. (2022). *Permasalahan Kependudukan di Indonesia*. Kompas.Com.
- Widaryanti, R., Rahmuniyati, M. E., & Yuliani, I. (2021). Kesiapan Penerapan Program 8000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Jarlit*, 17.
- Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2.
- Wuryanti, S., Marsiati, H., & Andayani, S. H. (2019). Edukasi Gizi Seimbang Anak Usia 0-2 Tahun Pada Ibu-Ibu Di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran/ Jakarta Pusat. *Abdimas Talenta*.
- Yanti, N. D., Betriana, F., & Kartika, I. R. (2020). Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. *Real of Nursing Journal (RNJ)*, 3.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan (Kelima)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.